PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAMA : ANDRIAN GUSTIO

NPM : 181010183

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andrian Gustio

181010183

Dengan Judul :

Penyelasaian Sengketa Pembarian Hak Milik Di Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya

No. Reg : 1327/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1881211295/35 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Sovi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 241/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1. Menunjuk

Nama	:	Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum.
NIP/NPK	:	87 01 02 084
Pangkat/Jabatan	:	Penata Tingkat I / C/d
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	ANDRIAN AGUSTIO
NPM	:	18 101 0183
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : **ANDRIAN GUSTIO**
NPM : 181010183
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

Pembimbing : **Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum.**

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
08-05-2022	Perbaiki populasi dan sampel dalam penelitian	
21-05-2022	Perbaiki Di alenia kedua dalam abstrak	
13-06-2022	Dalami dan fokuskan latar belakang masalah	
26-06-2022	Lengkapi beserta penjelasannya	
15-07-2022	Perbaiki analisis dalam pembahasan	
20-07-2022	Tambahkan hasil wawancara	
26-07-2022	Perbaiki penulisan pengutipan	
04-08-2022	Persetujuan Pembimbing	

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
Mengetahui :

4/2022

Dr. Rosydi Hamzah S. H., M. H.
Wakil Dekan I

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA

ANDRIAN GUSTIO

NPM : 181010183

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum.

Mengetahui :
Dekan

Dr. M. Musa , S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Andrian Gustio

NPM : 181010183

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan, 1 Juli 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HAK MILIK DIATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan



ANDRIAN GUSTIO

ABSTRAK

Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat. Sengketa tanah ulayat di Kecamatan Desa Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang dikarenakan adanya pengakuan seorang oknum yang bernama Maharani yang mana telah membuat sertifikat atas tanah ulayat tersebut yang dikeluarkan oleh BPN Dharmasraya tanpa sepengetahuan Ninik Mamak dan kaum adat Datuk Rajo Malelo.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya dan Faktor penghambat Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan tekhnik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya Penyelesaian telah dilakukan secara mediasi, dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di nagari Sitiung masih belum selesai dengan dikarenakan salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi dan Faktor penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya pertama dikarenakan Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah satu atau kedua belah pihak, menjadi kendala tersendiri. Dan tidak adanya Iktikad baik dari salah satu pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Milik, Tanah Ulayat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Indigenous Peoples' Customary Rights are sometimes set aside with other interests regardless of the spiritual value of a piece of land that exists in the community's territory. The customary land dispute in Sitiung Village District, Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, was due to the recognition of an individual named Maharani who had made a certificate for the customary land issued by BPN Dharmasraya without the knowledge of Ninik Mamak and the datuk Rajo Malelo indigenous people.

The main problems of this study are dispute resolution of granting property rights on customary land in Dharmasraya regency and inhibiting factors for resolving disputes over granting property rights on customary land in Dharmasraya regency.

The research method used in this study is to use Empirical legal research, with the technique of data collection, namely by interviews. Judging from its nature, this research includes descriptive research, namely research that provides a detailed and clear picture of the main problem of the research.

The result of the discussion of this study is that the Implementation of Dispute Settlement of Granting Property Rights on Customary Land in Dharmasraya Regency Settlement has been carried out by mediation, and in the end the dispute over the customary land of the people in nagari Sitiung is still not completed because one of the parties is not present in the mediation process and the inhibiting factor in the Settlement of Disputes over The Granting of Property Rights on Customary Land in Dharmasraya Regency is first due to Absence the parties to the dispute, either one or both sides, are an obstacle in itself. And the absence of good faith from any of the parties to the dispute.

Keywords: Dispute Resolution, Property Rights, Customary Land

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **"PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA "**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya.

Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda Emi Wati dan ayahanda Hardizar yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL.,selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Dr. M. Musa , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selam mengikuti perkuliahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Perpustakaan Umum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Penulis

ANDRIAN GUSTIO

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman judul

Sertifikat Originalitas Penelitian

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Tanda Persetujuan Skripsi

Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi

Surat Pernyataan

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Dan Manfaat Penilitian 6

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Konsep Operasional 16

F. Metode Penelitian 17

BAB II TINJAUAN UMUM 21

A. Hak Atas Tanah Ulayat 21

B. Hak Milik Atas tanah 30

C. Sengketa Pertanahan 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54

A. Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya 54

B. Faktor penghambat Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya 71

BAB IV PENUTUP 73

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Kesimpulan 73
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Populasi dan Sampel 18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan fundamental manusia sejak lahir sampai dia meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal untuk hidup.[1] Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apa pun, termasuk kacamata politik, militer, sosiologi, antropologi, psikologi dan ekonomi. Di mata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dead an roh sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik.

Adanya ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang menjurus pada bidang pertanahan dimaksudkan agar tercapainya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun pada praktiknya masih banyak masalah yang mencangkup mengenai perselisihan bahkan sengketa. Hal inilah yang mendasari ketentuan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada penyelenggara pemerintahan untuk dapat turut berperan menyelesaikan sengketa, selain pada lembaga peradilan melalui pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa haruslah mengacu pada undang-undang yang masih berlaku, hal ini dikarenakan undang-undang dianggap sebagai landasan hukum yang cukup jelas. Sebagai contoh implementasi yang terlaksanakan

1 Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* . (Jakarta:Pustaka Margaretha:2012), hal. 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa agraria sesuai dengan prosedur yang seharusnya dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi sengketa yang terjadi dimasyarakat secara signifikan.[2] Dizaman sekarang banyaknya sengketa tanah atau agraria haruslah mendapat perhatian dari pemerintah dengan kebijakan tentang pertanahan secara nasional. Banyaknya perkara sengketa agraria yang ada dinegara Indonesia tidak lepas dari tanah sebagai objek utama pemicu terjadinya sengketa agraria, hal lain yang memicu adanya sengketa adalah tidak optimalnya penggunaan terhadap tanah baik itu dari segi ekonomi yang berhubungan dengan yang dipegang dengan masyarakatnya, hal inilah yang memicu tanah tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsi sosialnya.[3]

Sistem hukum dalam masalah pertanahan di Indonesia terbagi atas dua yaitu hukum tanah yang berdasarkan atas hukum adat dan hukum tanah yang berdasarkan hukum barat yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk menghindari adanya konflik ditengah masyarakat, pada tanggal 24 september 1960 dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA. Dengan adanya undang-undang UUPA ini, maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang masalah pertanahan di Indonesia.

2 Galih Orlando, Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan,Vol 3 No 2 Oktober 2017, hal.13

3 Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2) Tahun 2017, 95–105.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengaturan terhadap tanah dalam UUPA terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.[4]

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat.

Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dengan beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).

4 Elza Syarif, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*.(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004) hlm 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengakuan terhadap masyarakat adat jelas diterangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 5, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapaannya. Seperti pada pasal 3 UUPA yang berbunyi:

> "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh berdtentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Walaupun peraturan tertulis sudah konkrit,yang diberikan oleh negara justru pembatasan-pembatasan yang mau tidak mau menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Dengan adanya pembatasan tersebut pemerintah dalam politik hukumnya akan mengarahkan bahwa suatu saat nanti hak-hak adat akan hilang atau dihilangkan.

Bahkan yang lebih ekstrem lagi dengan adanya pengakuan bersyarat dapat digunakan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat. Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat adat. Sehingga eksistensi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi.

Seperti sengketa tanah ulayat di Kecamatan / Desa Sitiung, Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatra Barat yang dikarenakan adanya pengakuan seorang oknum yang bernama Maharani yang mana telah membuat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sertifikat atas tanah ulayat tersebut yang dikeluarkan oleh BPN Dharmasraya tanpa sepengetahuan Ninik Mamak dan kaum adat Datuk Rajo Malelo, sedangkan pada kenyataannya sebagian ± 5 hektar dikuasai oleh Helmi Yati, kebetulan salah satu kaum adat serta sebagai pengurus Koperasi Sungai Sako (wadah suatu tanah ulayat oleh kaum adat untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang ditanami kebun kelapa sawit), yang mana melalui dokumen pengajuan sertifikat oleh Koperasi Sungai Sako, diketahui pemilik alas hak atas bidang tanah ± 5 hektar tersebut adalah Helmi Yati.

Berdasarkan latar belakang atau duduk perkara sengketa tanah ulayat diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan judul penelitian "**Penyelesaian Sengketa Atas Pemberian Hak Milik Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya "**

B. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dilaksanakan maka akan juga diuraikan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemberian hak milik di atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian sengketa pemberian hak milik di atas tanah ulayat Di Kabupaten Dharmasraya?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan Dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan penulisan, penulis memiliki sasaran untuk melaksanakannya dikarenakan:

a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemberian hak milik di atas tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelesaian sengketa pemberian hak milik di atas tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dihendaki agar dapat bernilai bermanfaat yaitu:

a. Sebagai pengembangan wawasan dan kompetensi diri dalam bidang ilmu hukum terhadap penyelesaian sengketa pemberian hak milik di atas tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya.
b. Memberikan informasi serta masukan kepada rekan - rekan yang berkeinginan melaksanakan untuk meneliti dan terhadap semua pihak yang membutuhkan dan untuk menjadi tamabahan referensi dan menjadi acuan bagi dunia pendidikan maupun dunia penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Tanah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.[5] Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA, yaitu :

> Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanah menurut pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah atas sebagain tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[6]

Menurut Iman Sudiyat, ada 6 (enam) jenis hak perorangan yang terpenting dalam hukum tanah adat, yaitu:[7]

a. Hak milik, hak yasan (*inlands bezitrecht*);
b. Hak wenang pilih, hak kinacek, hak mendahulu (*voorkeursrecht*);
c. Hak menikmati hasil (*genorecht*);
d. Hak pakai *(gebruiksrecht)* dan hak menggarap *(ontginningsrecht)* ;
e. Hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijt recht*);
f. Hak wenang beli (*naastingsrecht*).

---

[5] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: KencanaPrenada Media, 2010), hlm. 10.
[6] Ibid., hlm. 11.
[7] Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap atas Tanah*.(Medan: Perdana Publishin, 2011) hlm. 17-18.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam sistem hukum tanah nasional, terdapat hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, yang terdiri atas:[8]

a. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara yang merupakan tanah bersama. Bersifat komunalistik, artinya merupakan tanah bersama rakyat Indonesia. Bersifat religius, artinya seluruh tanah dalam wilayah negara Indonesia merupakan karunia Tuhan YME. Bersifat abadi, yang artinya hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah akan berlangsung tidak terputus-putus untuk selama-lamanya;[9]
b. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, merupakan hak penguasaan atas tanah dan meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia. Tafsiran ini pula ditegaskan dalam Pasal 2. Isi dan wewenang hak menguasai dari negara adalah:[10]
    1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan dan persediaan tanah, termasuk dalam wewenang ini adalah:
        a) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan.
        b) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.

[8] Urip Santoso , *Op. Cit.*, hlm. 76.
[9]Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hlm. 42.
[10] Ibid, 77-78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan dan mengusahakan tanahnya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

2) Menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdengan tanah, termasuk wewenang ini adalah:

a) Menentukan hak atas tanah yang mana yang bisa diberikan kepada WNI atau kepada badan hukum. Juga hak atas tanah yang mana yang bisa diberikan kepada warga negara asing.

b) Menetapkan dan mengatur pembatasan jumlah luas tanahyang dapat dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum.

3) Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum dengan tanah, termasuk dalam wewenang ini adalah:

a) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia .

b) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah;

c) Mengatur penyelesaian sengketa tanah dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

c. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukumadat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, hak ulayat masyarakat-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat hukum adat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakatmasyarakat hukum adat tertentu.[11]

Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat dalam hak tanah nasional. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh hukum adat masing-masing, artinya bila kenyataannya tidak ada maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru;[12]

d. Hak-hak perseorangan/individual yang memberi kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, memakai dan mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu berupa:

   1) Hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang ketentuan-ketentuan pokoknya terdapat dalam UUPA serta hak-hak lain dalam hukum adat setempat, merupakan penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya. Hak-hak atas tanah itu pokok-pokok ketentuannya ada dalam Pasal 4, 9, 16 dan Bab II UUPA;

   2) Hak atas tanah wakaf yang merupakan hak penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu bekas hak milik, yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakan selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum

[11] Boedi Harsono , Op. Cit., hlm. 185-186.
[12] Urip Santoso , *Op. Cit.*, hlm. 76.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lainnya, sesuai ajaran hukum Islam. Perwakafan tanah hak milik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai pelaksanaan Pasal 49 UUPA;

3) Hak tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada kreditur tertentu untuk menjual lelang bidang tanah yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitur cidera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA.

2. Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkanperbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak .[13]

[13] Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*,(Bandung : Mandar Maju, 1991) hal. 57.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.[14]

3. Tanah Ulayat

Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam Penghulu, Nagari, Kaum atau beberapa nagari. Tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau dihilangkan begitu saja.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No 5 Tahun 1999, hak ulayat adalah kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari satu masyarakat hukum adat tertentu. Hal ini lah yang melahirkan istilah “hak atas tanah ulayat”.

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menerangkan bahwa pada pasal 1 ayat (7) yaitu:

[14] Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*,(Bandung : Mandar Maju, 1991) hal. 57.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra Barat." [15]

Tujuan dari pengaturan tanah ulayat tersebut dapat dilihat pada pasal 4 yaitu Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termaksuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turunmenurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat kaum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada pasal 1 ayat (10) adalah Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Tanah ulayat kaum ialah sawah ladang yang digarap langsung oleh anggota kaum dengan status ganggam bauntuak yang masih dipegang oleh kaum. Tanah ulayat kaum ini disebut juga pusaka tinggi. Tanah pusaka tinggi yaitu tanah yang dimiliki satu kaum yang merupakan milik bersama anggota kaum dan diperoleh secara turun menurun yang mana sudah sulit ditelusuri pemilik asalnya.

Tanah ulayat kaum yang merupakan harta kekayaan harus dipelihara keutuhannya, sehingga adat melarang menjual lepas tanah ulayat ini, karena

[15] Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanah ini oleh nenek moyang diniatkan untuk anak cucunya. Namun dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatannya untuk sementara waktu dalam bentuk gadai.

Jadi tanah hak ulayat kaum ini dimiliki oleh kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang mana penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Mamak jurai/mamak kepala waris disini adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu keluarga. Tanah ulayat kaum dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan materinial yang diwarisi secara turun menurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi.

Pengakuan terhadap keberaaan tanah ulayat terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang merupakan hukum positif dari hukum nasional Indonesia. Syarat atas dasar pengakuan terhadap hak ulayat terdiri 2 syarat, yaitu syarat mengenai keberadaan atau eksistensinya dan syarat mengenai pelaksanaanya. Pasal 3 UUPA tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai kriteria penentu tentang hak ulayat, Pasal 3 mengatakan bahwa:[16]

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

[16] Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan dengan adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan, yaitu sebagai berikut:[17]

a. Subjek hak ulayat

Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua (2) yaitu:[18]

1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
2) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

b. Obyek hak ulayat

Obyek hak ulayat yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (Lebensraum).

c. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

[17] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*,(Kompas, Jakarta, 2005), hal. 65.
18 *Ibid*, hlm.181

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan penelitian ini terhindar dari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul ini maka penulis memberikan batasan dalam judul penelitian ini, yaitu:

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.[19]
2. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.[20].
3. Hak milik adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.[21]

[19] https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses 20 Januari 2021
[20] Sumarto, *"Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI"* Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. hlm. 2
[21] Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru,* Bandung,P.T Alumni, 2006, hlm. 46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.[22]

F. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

Penulis mempergunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum Empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan tekhnik wawancara[23].

Sedangkan sifatnya yaitu *deskriptif*,[24] dimana penulis menggambarkan tentang Penyelesaian Sengketa Atas Pemberian Hak Milik Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama[25]. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian[26].

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

---

[22] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 2003,hlm.185-186
[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,* 2017, Hlm. 11.
[24] *Ibid.*,hlm.12
[25] Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Uir*. Pekanbaru: Uirpress, 2021,hml. 15.
[26] *Ibid.*,15

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari Sitiung
2. Ninik mamak
3. Staff Hukum BPN Kabupaten Dharmasraya
4. Masyarakat adat nagari Nagari Sitiung

Rincian populasi dan sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu:

Tabel I.1

Daftar Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Tekhnik penarikan Sampel
1.	Ketua Kerapatan Adat Nagari Sitiung	1 Orang	1 Orang	Sensus
2.	Ninik mamak	9 Orang	9 Orang	Sensus
3.	Staff Hukum BPN Kabupaten Dharmasraya	1 Orang	1 Orang	Sensus
4.	Masyarakat adat nagari Nagari Sitiung	20 Orang	1 Orang	*Purposive sampling*
Jumlah		31 Orang	12 Orang	

Sumber : Diolah dari data lapangan tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Data Primer, ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan-keterangan atau fakta-fakta berkaitan dengan:

   1) Penyelesaian Sengketa Atas Pemberian Hak Milik Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.
   2) Hambatan Penyelesaian Sengketa Atas Pemberian Hak Milik Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.
b. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara diolah serta disajikan sesuai dengan permalasahan yang telah penulis tetapkan. Kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian kalimat dan pentabelan, selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori hukum.Selanjutnya setelah dianalisis lalu dilakukan penarikan kesimpulan yaitu secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus berupa ketentuan perundang-undangan,sedangkan hal yang umum yaitu berdasarkan pendapat para ahli.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak Atas Tanah Ulayat

1. Definisi Tanah Ulayat

Tanah adat yang dalam bahasa tetun disebut dengan istilah "*Rai Manaran"* secara konseptual sama dengan istilah Tanah Ulayat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingrecht.*[27]

2. Definisi Hak Ulayat

Hak Ulayat sebagai istilah yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/ kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Secara teoretis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusuma Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai sautu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan

27 Maria S. W Sumardjono, *op.cit*, hlm.55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban sesuatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*Lebensraum*).[28]

Hak Ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas Wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak. Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan) dan pemeliharaan tanah.

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

28 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003,hlm.185-186

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatanperbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hubungan antara masayarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Di mana Kepala adat mempunyai peranan dan penyelesaiaan sengketa tanah Ulayat bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dikenal dengan hak menguasai dari Negara, di sini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu. Sementara itu Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban Hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua (2) unsur yaitu:[29]

a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum politik.

3. Definisi Tanah Ulayat dan Hak Ulayat di Masyarakat Adat

Dalam masyarakat adat Dualasi, tanah ulayat adalah tanah yang luas yang merupakan milik bersama dari suatu klan atau suku. tanah itu dibagi atau tidak, diolah atau tidak itu tidak penting. Tuan tanah atau *Ama Na'i Adat*

29 *Ibid*, hlm.182

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berhak atas tanah ulayat tersebut dan mengaturnya demi kepentingan anggota sukunya. Dia yang berhak untuk memberikan kepada masing-masing anggotanya supaya mereka dapat menguasai dan menggunakannya. Semua anggota suku bertanggung jawab penuh atas segala peristiwa yang terjadi atas tanah tersebut tetapi wewenang lebih besar ada pada *Ama Na'i Adat.*

4. Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karaktesistiknya

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua (2) yaitu:[30]

a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Selanjutnya Bushar Muhamad mengemukakan objek hak Ulayat meliputi; [31]

a. Tanah (daratan)

   Yang dimaksud dengan tanah disini adalah tanah yang belum dibuka, dasar sungai yang menjadi kering, pulau-pulau yang baru muncul dan tanah delta.

30 *Ibid*, hlm.181

31 Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta,Pradnya Paramitha, 2002,hlm.13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya) Yang termasuk bagian dari air adalah perairan, danau, pantai dan lain-lain.

c. Tumbuh-tumbuan

Yang termasuk tumbuh-tumbuhan di sini adalah tumbuhan secara liar, pohon-pohon yang membentuk hutan kayu

pertukangan atau kayu bakar.

d. Binatang

Yang termasuk dalam binatang disini adalah semua binatang yang hidup dalam tanah tersebut baik itu piaraan maupun yang liar.

Objek hak Ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena Hak Ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai " res nullius (tanah yang tidak ada pemiliknya)".

Hak Ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku keluar dan kedalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejateraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualiaan dimana anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan izin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut kekuatan berlaku ke dalam.

Sedangkan terhadap sikap berlaku keluar adalah hak Ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut. Menurut Boedi Harsono

> " bahwa terciptanya Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenk moyak atau sesuatu Kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan yang satu-satunya mempunyai hak ulayat. Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyrakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya".[32]

5. Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah Ulayat

Boedi Harsono menyatakan bahwa: hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimilkinya. Sesuatu yang wajib, boleh atau larangan untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan atas tanah ulayat akan menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.[33]

32 Boedi Harsono, *Op.cit*,hlm.272
33 *Ibid*, hlm.24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun yang menjadi pengaturan hak atas tanah yaitu:

a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
3) Mengatur hal-hal mengenai objeknya, siapa yang menjadi pemegang haknya dan syarat-sayarat bagi penguasaannya;
4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

b. Hak penguasaan hak atas tanah sebagi hubungan hukum yang konkrit.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak atas penguasaan atas tanah tertentu;
2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.

4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;

5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.[34]

6. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsep hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanag yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut Hak Ulayat.

Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa:

" hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutran hukum (desa,suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaanya diatur oleh ketua persekutuan (kepalas suku/ kepala desa) yang bersangkutan "[35]

Sedangkan Boedi Harsono mengatakan bahwa :

" Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayhnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang

[34] Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta,Kencana PranediaMedia, 2005,hlm.74-75

[35] G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiadi, *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT.Bina Aksara, 1985,hlm.88

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya ".

Jadi, Hak Ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Bersifat magis religius bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupannya berlangsung.

Dengan demikian hak Ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat Magis Religius serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun temuran yang oleh para ilmuwan disebut sebagai proses budaya hukum.

7. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional

Hukum Tanah Nasional (dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria) mengakui keberadaan/eksistensi Hak Ulayat bagi suatu masyarakay hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan ini oleh Undang-Undang Pokok Agraria dituangkan dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 3 bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

" Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ".

B. Hak Milik Atas tanah

Sebelum melangkah kepada pengertian hak milik atas tanah, maka perludipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hak atas tanah terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dan tanah yang dihakinya.[36]Kata "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Sedangkan kata "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian,peternakan, perikanan dan perkebunan. Selanjutnya, mengenai wewenang, Soedikno Mertokusumo membagi wewenang tersebut kedalam 2 hal yakni sebagai berikut:

a. Wewenang umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untukkepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahitu dalam batasbatas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

[36] Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria,* Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988 hlm. 4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Wewenang khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyaiwewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hakatas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapatuntuk kepentingan pertanian darilatau mendirikan bangunan,wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah tanah yang hanyauntuk mendirikan atau mempunyai bangunan atas tanah yang bukanmiliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah rnenggunakanhaknya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan,petemaakan dan perkebunan.[37]

Objek kajian atas pendaftaran tanah menurut pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997:[38]

a) Hak Milik

Landasan idil daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan anatara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Dahulu, hak milik dalam pengertian hukum barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang mereka anut yaitu individualisme, kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tadi tidak dapat diganggu-gugat. Akibat adanya ketentuan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang, meskipun hal itu perlu untuk

[37] *Ibid*, hlm. 45

[38] Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru,* Bandung,P.T Alumni, 2006, hlm. 46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepentingan umum.Sebagai contoh dari kemutlakan hak milik ini dibuktikan dengan adanya Arres 14 Maret 1904, yaitu Lantaarpaal Arres, sehingga perbuatan kotapraja yang waktu itu memerintahkan penyedian kira-kira satu meter persegi tanah dari seorang pemilik tanah untuk menancapakan tiang lentera bagi penerangan umum, oleh Hakim dianggap bertentangan dengan undang-undang, karena membatasi hak milik perseorangan. Konsepsi hak milik semacam ini pada zaman sekarang sudah tidak dapat diterima lagi. Hak milik atas tanah dalam pengertian sekarang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut:" Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Menurut Pasal 6 dari UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh disisni tidak berarti hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan lain perkataan, hak milik yang merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya. Sehingga si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya atas miliknya itu, asal saja tindakannya itu tidak bertentangan dengan undangundang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain.[39] Jadi harus pula diingat kepentingan umum, seperti telah disebutkan dalam Pasal 6

[39] *Ibid.*, hal.45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UUPA tadi. Apalagi kita menganut paham bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Arti dari pada hak milik mempunyai fungsi sosial ialah bahwa hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak bolehdipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi hak milik ini harus mempunyai fungsi kemasyarakatan, yang memberikan berbagai hak bagi orang lain.

1. Terjadinya Hak Milik

Penetapan Pemerintah, karena Undang-Undang. Dengan terjadinya hak milik itu, timbulah Menurut Pasal 22 hak milik terjadi karena, menurut Hukum Adat, karena hubungan hukum antara subjek dengan bidang tanah tertentu yang isi, sifat dan ciri-cirinya sebagai yang diuraikan di atas, tanah yang sebelum itu berstatus tanah negara atau tanah hak lain (tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai). Baru dengan terjadinya hak milik itu tanah yang bersangkutan bersetatus tanah hak milik. Cara memperoleh hak milik demikian disebut originair. Hak milik bisa juga diperoleh secara derivatin. Menurut cara ini suatu subjek memperoleh tanah dari subjek lain yang semua sudah berstatus tanah hak milik, misalnya karena jual-beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan wasiat atau warisan. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum itu, hak milik yang sudah ada beralih dari subjek yang satu kepada yang lain.[40]

a) Terjadinya Hak Milik Menurut Hukum Adat

[40] *Ibid.*, hal.46

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Pasal 22 hal ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Demikian penjelasan pasal tersebut. Terjadinya hak atas tanah menurut Hukum Adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Pembukaan hutan secara tidak teratur dapat membawa akibat yang sungguh merugikan kepentingan umum dan negara, berupakerusakan tanah, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Menyerahkan pengaturan pembukaan tanah para Kepala Adat mengakibatkan pemborosan, sebagai yang sering terjadi di beberapa daerah transmigrasi di luar Jawa.

b) Terjadinya Hak Milik Karena Penetapan Pemerintah

Hak milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena Penetapan Pemerintah itu diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian Pasal 22 ayat (2) huruf a, Sebagaimana telah disinggung di atas, tanah yang diberikan dengan Hak Milik itu semula berstatus tanah negara. Hak milik itu pun dapat diberikan sebagai perubahan daripada yang sudah dipunyai oleh pemohon, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik ini pun merupakan pemberian hak baru. Dalam kedua hal itu hak miliknya diperoleh secara originair.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan di atas belum ada.[41]

Pejabat-pejabat yang berwenang memberikan hak milik, pengaturannya yang terdapat dalam PMDN No.1 Tahun 1967 tentang pembagian tugas dan wewenang agraria. Instansi yang berwenang memberikan hak milik adalah Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria,kecuali dalam hal-hak wewenang untuk memberikan hak atas tanah dilimpahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah. Dalam hal tersebut dibawah ini Gubernur/Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberikan hak milik.

i. Jika hak itu diberikan kepada para transmigran dan kerluarganya.
ii. Jika pemberian hak itu dilakukan didalam rangka pelaksanaan landreform.
iii. Jika hak itu diberikan kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanahnya merupakan bekas tanah gogolan tidak tetap.
iv. Di luar hal-hal tersebut di atas jika tanah yang diberikan dengan hak milik itu merupakan tanah pertanian dan luasnya tidak lebih dari 5000 meter persegi

[41] *Ibid*., hal.48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan wewenang Gubernur tersebut tersebut dilakukan oleh para Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan atas nama Gubernur.

2. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara

Hak milik tersebut diberikan atas permohonan yang bersangkutan. Sudah barang tentu pemohon harus memenuhi syarat untuk memperoleh dan mempunyai tanah dengan hak milik sebagai yang telah diuraikan diatas.

Permohonan untuk yang berwenang dengan perantaraan Bupati/Walikota. Kepala Kantor Agraria Daerah bersangkutan. Oleh instansi yang berwenang hak milik yang dimohon itu diberikan dengan menerbitkan suatu surat keputusan pemberian hak milik, yang disusun menurut contoh yang ditetapkan sebagai lampiran Peraturan Menteri Muda Agararia tersebut di atas. Selain syarat-syarat dengan keadaan dan peruntukan tanahnya, di dalam surat keputusan pemberian hak milik itu dimuat pula syarat-syarat umum.[42]

3. Pemberian Hak Milik Sebagai Perubahan Hak

Pihak yang mempunyai tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai, jika menghendaki dan memenuhi syarat-syaratnya dapat mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang, agar haknya itu diubah menjadi hak milik. Semula sesuai dengan praktek agraria sebelum berlakunya UUPA, yaitu di dalam menyelesaikan perubahan hak

[42] *Ibid.*, hlm, 49-50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

eigendom menjadi hak milik Adat, pemohon lebih dahulu harus melepasakan haknya hingga tanahnya menjadi tanah Negara.[43]

4. Yang Dapat Mempunyai Hak Milik

Yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu:

(a). Warga Negara Indonesia.

(b). Badan-badan hukum tertentu.

(c). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.

b). Hak guna usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapatdiperpanjang paling lama 25 tahun yang digunakan untuk perusahaan pertanian,perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA). Mereka yang dapatmemiliki status hak guna usaha, adalah:

i. Warga Negara Indonesia

ii. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi Indonesia.

c). Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dari asal tanahnya,hak guna bangunan dapat terjadi pada tanah negara, tanah hak pengelolaan, dantanah hak milik, dan yang dapat mempunyai status hak gunan bangunan

[43] *Ibid.*, hlm 51

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah Warga Negara Indonesia ii. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi Indonesia.

d). Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan ataupun memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lainyangmemberi wewenang dan kewajiban yang ditentutkan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam suatu perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asaltidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang.[44]

e). Hak Pengelolaan

Pemberian hak pengelolaan maksudnya adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadapemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga ataupun dapat berupa kerja samadengan pihak ketiga.

f). Hak atas tanah wakaf

Wakaf tanah hak milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

g). Hak milik atas satuan rumah susun

[44] Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang bersifat perorangan yang meliputi hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

h). Hak tanggungan

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atastanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA yang diperuntukkan sebagaipelunasan utang tertentu.

i). Tanah negara

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.[45]

C. Sengketa Pertanahan

1. Pengertian Sengketa

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan

[45] Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi[46].

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia[47].

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Rusmadi Murad[48] sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.

---

[46] Sumarto, *"Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI"* Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. hlm. 2

[47] Hadimulyo, *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"* ELSAM : Jakarta. 1997. hlm. 13

[48] Rusmadi Murad, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah"* Bandung : Alumni, 1999. hlm. 22-23.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).

c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional[49].

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa[50] : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik

[49] Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
[50] Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum *(privat atau publik)* mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum *(privat atau publik),* masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Sengketa Pertanahan

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik sengketa pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.[51]

a. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
b. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
c. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di *back up* pemerintah (oknum pejabat) dan preman.

Hasim Purba[52] dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu:

Maria S.W. Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua'di[53] dalam disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam lima kelompok yaitu :

a. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
b. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan *land reform*.
c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.

[51] Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022. http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan.
[52] Hasim Purba, *"Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan"* Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. hlm. 167. Bandingkan dengan Widiyanto, *"Potret Konflik Agraria di Indonesia"* Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. hlm.23-34.
[53] Sholih Mua'di, *"Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)"* Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan

e. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu[54]:

a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
b. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
f. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

[54] Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 4Juni 2022. http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan. Lihat juga yang dikutip Sumarto, hlm. 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, hlm. 23-34.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain :

a. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya;

b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak;

c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspekaspek social praktis. Alasan yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan, oleh karena itu penyelesaian sengketa hokum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

2. Pengertian Konflik Pertanahan Konflik menurut pengertian hokum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama33. Selanjutnya, kata "konflik" menurut Kamus Ilmiah Populer adalah pertentangan, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan pertentangan, percekcokan Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata '"konflik" mempunyai pengertian yang lebih luas, oleh karena istilah konflik tidak hanya digunakan dalam kasus pertanahan yang terkait dengan proses perkara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pidana, juga terkait dalam proses perkara perdata dan proses perkara tata usaha negara.

Dalam penelitian ini konflik yang dimaksudkan adalah konflik pertanahan yang terkait proses perkara pidana, khususnya ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hokum pidana. Sebutan "tanah" dalam bahasan ini dapat dipahami dengan berbagai arti, maka penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.

Dalam hokum tanah sebutan istilah "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 4 Undang-UndangPokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa; "Atas dasar hak menguasai dari Negara ..., ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang.". Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaan nya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bias tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakansebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dengan demikian yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya.

Menurut Par lindungan tanah hanya merupakan salah satu bagian dari bumi. Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam penjelasan Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian tanah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan PemakaianTanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya, dirumuskan:

(1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

(2) Tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. Tanah dalam pengertian geologi sagronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

Beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. Fokus kajian dalam tesis ini dibatasi pada konflik pertanahan di permukaan bumi sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya yang terkait dengan hak milik atas tanah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konflik pertanahan menurut A. Hamzah diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas dua bagian, yang meliputi:

(1) Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hokum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam beberapa Pasal yang tersebar dalam kodifikasi hokum pidana (KUHP);

(2) Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hokum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundangundangan pertanahan di luarkodifikasi hokum pidana.

3. Sengketa Tanah dan Permasalahannya Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan.

Konflik agrarian ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah danbenda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik besifat structural misalnya beragam kesenjangan.

Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hokum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Maria. S.W. Sumardjono, secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu:

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain;

2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform;

3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;

5. Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hokum adat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hokum tanah, antara lain :

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya:
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak;
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspekaspek social praktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hokum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Permasalahan tanah makin kompleks dari hari kehari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang Pokok Agraria di lapangan menjadi makin tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertical maupun horizontal yang makin menajam.

Meski demikian perlu disadaribahwa sengketa pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) sekarang ini kelihatannya tanah sudah menjadi alat komoditi perdagangan yang dapat dipertukarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya

Dalam adat Minangkabau, sebagian besar wilayah memiliki status harta warisan.Dari tanah ulayat, lahan yang tidak dimanfaatkan secara permanen secara pertanian, dan sebagian besar lahan hutan yang yang tidak di kenal di bawah pengelolaan dewan desa, sebagian besar telah dibudidayakan dari generasi ke generasi dan telah menjadi warisan.

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah menurut tradisi orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harato pusako (harta pusaka), tanah rajo, dan tanah ulayat. Harato pusako dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi.

Harato pusako di Minangkabau dibagi menjadi dua:

a. Harato Pusako Tinggi (Harta Pusaka Tinggi)

Harato pusako tinggi adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengolahan mamak kapalo warih (mamak kepala waris / lelaki tertua dalam kaum). [55]

b. Harato Pusako Randah (Harta Pusaka Rendah)

[55] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Harato pusako randah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikitlah status harta ini dipandang masih rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual ataupun dibagi-bagi di antara mereka[56].

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (TUP), tanah ulayat dibagi kedalam empat kategori, yaitu:[57]

a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
b. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
c. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumberdaya alam yang berada diatas dandidalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.
d. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber dayaalam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Datuk Rajo Malelo dari konflik yang sering terjadi di Nagari Sitiung bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak ulayat kaum internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua,

[56] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[57] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan pemerintah atau pemilik modal.[58]

Penyelesaian sengketa atas tanah dapat dilakukan melalui proses ligitasi dan non ligitasi. Penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses ligitasi menghasilakn keputusan yang bersifat advarsial atau putusan yang belum merangkul kepentingan bersama, lama dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan sering menimbulkan permusuhan antara pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa melalui proses non ligitasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution(ARD). Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang diseapakati para pihak yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadila dengan cara *konsultasi, negsiasi, konsolidari, atau penilaian ahli.* Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa proses penyelesaian sengketa non ligitasi diantaranya:[59]

1. Negosiasi

   Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah,

[58] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[59] Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundingan atau ”*urung rembuk*”.[60] Proses ini tidak mmelibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelsaikan sengketa mereka. Para pihak l terlibat langsung dalam dialog dan proses penyelesaiannya. Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka ketentraman komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan dari para pihak serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain.[61]

2. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggeris “*mediation”* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia , pengertian mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator karena para pihak secara suka rela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Oleh karena itu mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi dari pihak-pihak yang sedang bersengketa. Dalam kondisi tersebut, mediator harus bersifat netral/tidak memihak dan

[60] Syahsrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukumm Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 9
[61] *Ibid*, h.10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpartisipasi aktif membantu para pihak untuk menemukan perbedaan persepsi/pandangan. Pihak ketiga (mediator) atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya mediator berperan sebagai penengah/pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator. Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mepermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan–perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan yang disengketakan, serta mengatur pengungkapan emosi para pihak.

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pengertian arbitrase dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjaan tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,
b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Jenis arbitrase dalam penyelesaian sengketa ada 2 (dua) macam yaitu:

a. *Arbitrase Ad hoc (arbitrase Volunteir)*

   Arbitrase Ad hoc adalah *arbitrase* yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidentil dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputus. Para pihak yang bersengketa dapat memilih atau menentukan arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbitrasenya yang bertugas memeriksa atau memutus sengketa yang bersangkutan.

b. *Arbitrase Institusional*

   Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen yang sering disebut *"*permanent *arbitrase body"*. *Arbitrase* ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Arbitrase institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan procedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan arbiter.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nasir yang merupakan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo sengketa tanah ulayat di Kecamatan / Desa Sitiung, Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatra Barat berawal dari adanya pengakuan seorang oknum yang bernama Maharani yang mana telah membuat sertifikat atas tanah ulayat tersebut yang dikeluarkan oleh BPN Dharmasraya tanpa sepengetahuan Ninik Mamak dan kaum adat Datuk Rajo Malelo, sedangkan pada kenyataannya sebagian ± 5 hektar dikuasai oleh Helmi Yati, kebetulan salah satu kaum adat serta sebagai pengurus Koperasi Sungai Sako (wadah suatu tanah ulayat oleh kaum adat untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang ditanami kebun kelapa sawit), yang mana melalui dokumen pengajuan sertifikat oleh Koperasi Sungai Sako, diketahui pemilik alas hak atas bidang tanah ± 5 hektar tersebut adalah Helmi Yati.[62]

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nasir yang merupakan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo asal usul tanah tersebut berasal dari tanah ulayat kaum Datuk Rajo Malelo berdasarkan ranji.[63]

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sutan Datuk Marajo yang merupakan ketua Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui.

[62] Hasil wawancara dengan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo tanggal 6 juni 2022.
[63] Hasil wawancara dengan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo tanggal 6 juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Cara ini diungkapkan dalam fatwa adat yang berbunyi:"*bulek aia dek pambuluhan, bulek kato dek mufakat*. Sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat MinangKabau diselesaikan secara *bajanjang naik batangga turun* artinya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat keluarga kemudian ke tingkat kampung dan terakhir tingkat nagari. Sedangkan *batanggo turun* berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab yang menyelesaikan itu adalah orang-orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Dalam hal ini kalau terjadi sengketa dalam keluarga diselesaikan oleh mamak yang ada dalam keluarga. Kalau tidak selesai pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh penghulu paruik dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai, dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)".[64]

Adapun bentu-bentuk sengketa tanah ulayat dan penyelesaiannya melalui lembaga adat di Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. **Sengketa tanah ulayat anggota paruik (anggota kaum)**

"Sengketa tanah ulayat dalam anggota kaum atau saparuik terjadi kerena adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah *ganggam bauntuak* maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfa'atkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya, akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum. Selain itu sengketa dalam anggota kaum. Hal ini bisa terjadi karena masalah batas sepadan tanah yang dimiliki oleh anggota kaum dengan anggota kaum lainnya atau karena anggota kaum lainnya itu belum menggarap bagiannya lalu anggota kaum yang menggarap memindahkan batas yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris. Kemudian pada saat anggota kaum yang belum menggarap itu melihat tanah bagiannya sudah digarap atau diambil oleh anggota kaum yang telah menggarap dengan memindahkan batas yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris sehingga terjadi pertengkaran atau sengketa antara angota kaum yang telah memperoleh *ganggam bauntuak* tersebut karena pihak yang telah mengarap dahuluan itu merasa memiliki tanah yang telah digarapnya. Masalah seperti ini diselesaikan oleh mamak kepala waris dengan cara musyawarah anggota paruik baik yang bersengketa maupun yang tidak terlibat dalam sengketa guna masing-masing anggota paurik mengetahui batas bagian masing-masing. Sebelum diadakan musyawarah dengan anggota paruik tersebut terlebih dahulu mamak kepala waris melihat tanah yang disengketakan itu. Sebelum mamak

[64] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepala waris menetapkan keputusan dilakukan upaya damai antara pihak yang bersengketa dengan memanggil pihak yang bersengketa dan menawarkan apakah kedua belah pihak bersedia berdamai dengan menyelesaikan berdua masalah yang disengketakan itu. Apabila tidak mamak kepala waris memutuskan agar masing-masing yang menguasai atau menggarap tanah yang telah diperoleh dengan batas yang telah ditentukan oleh mamak kepala waris, tidak boleh menyerobot bagian anggota paruik yang lainnya dengan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh yang menggarap tanah anggota kaum yang lain. Setelah putusan ditetapkan oleh mamak kepala waris masing-masing yang bersengketa menanda tangani surat keputusan itu, sedangkan anggota lainnya ikut menandatangani sebagai saksi".[65]

2. Sengketa tanah ulayat antar anggota paruik (kaum)

"Antar anggota paruik maksudnya ialah suku yang sama tetapi berlainan ibu pada nenek yang sama. Sengketa antar anggota paruik itu terjadi karena anggota paruik tidak menjaga tanah ulayat kaumnya tetapi anggota suku menggarapnya begitu lama sehingga anggota suku itu merasa memilikinya, padahal tanah yang digarap itu seharusnya digarap oleh anggota paruik yang lain. Oleh karena itu anggota paruik yang tidak menggarap tersebut menuntut bagiannya untuk ikut menggarap tanah kaum itu. Penyelesaian sengketa antar paruik ini dilaksanakan dengan cara musyawarah antar paruik yang dihadiri oleh mamak kepala waris masing-masing paruik. Dalam hal ini mamak kepala waris masing-masing paruik menjelaskan kedudukan tanah ulayat tersebut, kemudian menjelaskan peruntukan masing-masing paruik secara musyawarah dan membaginya secara adil. Kalau anggota paruik yang menggarap tanah ulayat anggota paruik lain harus mengembalikannya kepada anggota paruik yang seharusnya menggarap tanah tersebut. Anggota paruik yang menggarap tanah anggota paruik lain itu berhak menerima ganti rugi dari anggota paruik yang akan menerima tanah tersebut sesuai dengan nilai tanaman yang ada di dalamanya. Penentuan nilai tanaman yang ada pada tanah tersbut disepakati melalui musyawarah anggota paruik dan dilaksanakan secara suka rela. Mamak kepala waris masing-masing paruik menyetujui hasil musyawarah kedua belah pihak. Keputusan bersama antara dua paruik atau lebih dituangkan dalam berita acara atau ditulis dalam sebuah surat dengan ditanda tangani oleh angora paruik yang bersengketa dan diketahui oleh mamak kepala waris masing-masing paruik".[66]

3. Sengketa Tanah Ulayat antar Suku

"Suku adalah warga dalam suatu nagarai yang terdiri dari kelonpok-kelompok dari anggota kaum yang berbeda. Di Minangkabau saat ini dalam suatu nagari dihuni misal 4 (empat) macam suku. Yaitu, Jambak, Caniago,

[65] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[66] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanjung dan Melayu. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dimiliki secara bersama anggoata suku dan dimanfa'atkan oleh anggota suku. Apabil terjadi sengketa tanah ulayat antar suku, maka penyelesaiannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat. Penyelesaiannya dilakukan secara mausyawarah antar pengulu suku yang bersengketa dengan dihadiri oleh penghulu suku yang ada di nagari tersebut. Apabila ada penghulu suku dalam nagari itu tidak hadir atau yang mewakilinya maka penyelesaiannya ditunda sampai penghulu-penghulu suku atau wakilnya yang ada dalam nagari itu bisa menghadirinya. Musyawarah penghulu-penghulu suku itu dilaksanakan di balai adat nagari. Dalam musyawarah penghulu-penghulu suku ini msing-masing suku menjelaskan kronologis kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki oleh suku masing-masing dengan mengemukakan bukti-bukti kepemilikan yang mereka miliki serta menjelaskan batas-batas tanah ulayat yang mereka miliki. Setelah kedua suku yang bersengketa menyampaikan bukti-bukti kepemilikan masing masing, dimintakan kepada penghulu suku yang lain yang mengetahui sejarah tanah ulayat tersebut terutama penghulu suku yang berdekat dengan tanah ulayat yang disengketakan. Setelah mendengar keterangan penghulu masing-masing pemilik tanah yang disengketakan dan penghulu lain yang menjelaskan keberadaan tanah ulayat tersebut, dicarikan jalan keluar atau solusi sengketa secara adil. Dalam hal ini peran wali nagari sangat menentukan. Sebelum ditetapkan keputusan penyelesaian sengketa tanah ulayat ini wali nagari mencoba menawarkan kepada pihak yang bersengketa untuk menerima pendapat penghulu yang menjelaskan pemilik yang berhak memilikinya dengan batas-batas yang telah dijelaskan dan diakui oleh penghulu-penghulu lain yang menghadiri pertemuan itu. Apabila kedua suku yang bersengketa itu menerima tawaran yang disampaikan wali nagari, dibuatkan surat keterangan wali nagari yang menjelaskan kepemilikan tanah yang disengketakan itu dengan batas-batas sesuai dengan yang diusulkan dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan ditanda tangani oleh kedua suku yang bersengketa dan diketahui oleh penghulu-penghulu suku yang hadir serta disahkan oleh wali nagari. Masing-masing penghulu suku meperoleh keputusan wali nagari tersebut untuk dijelaskan kepada anggota suku masing-masing. Apabila kedua suku yang bersengketa menolak, maka sengketa itu diusulkan penyenlesaiannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)".[67]

4. Sengketa Tanah Ulayat antara Suku dengan Nagari

"Sengketa tanah ulayat antara suku dengan nagari biasanya terjadi karena menurut anggota suku tanah ulayat tersebut merupakan hak dari anggota suku mereka yang telah digunakan oleh nagari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa antara suku dengan Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam hal ini penghulu suku mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari dengan

[67] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjelaskan persengketaan tersebut secara terperinci sekaligus bertuk sengketanya. Kalau Nagari memanfa'atkan tanah suku untuk pembangunan Nagari, pemohon menjelankan kronologis kejadiannya sampai tanah tersebut dikuasai oleh Naga. Setelah permohonan itu diajukan oleh penghulu suku yang merasa dirugikan oleh Nagari, Kerapatan Adat Nagari memanggil para pihak untuk dimintai keterangan masing-masing. Setelah kedua belah pihak didengarkan keterangannya, KAN mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan penyelesaian yang baik antara suku dengan Nagari. Biasanya KAN menawarkan kepada suku untuk menerima ganti rugi dari Wali Nagari atau Wali Nagari mengembalikan tanah tersebut kepada suku. KAN menyelesaikannya secara musyawarah dan menegakkan keadilan terhadap suku yang merasa dirugikan oleh Nagari. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan keputusan yang paling sering diambil oleh KAN supaya dikemudian hari tidak terjadi sengketa lagi. Setelah kedua belah pihak setuju dengan apa yang telah disepakati, maka Wali Nagari membuat Surat keputusan yang isinya sesuai dengan yang telah disepekati dan penghulu-penghulu suku membubuhi tanda tangan sebagai saksi dan Wali Nagari menanda tangani surat keputusan tersebut serta dibubuhi cap/stempel Nagari dan masing-masing pihak yang bersengketa (suku dan Nagari) diberi satu rangkap untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak".[68]

"Semua sengketa yang telah diuraikan di atas bila tidak selesai atau tidak berhasil didamaikan oleh mamak paruik, suku dan penghulu, maka perkaranya dilanjutkam kepada lembaga adat tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga ninik mamak yang ada dalam KAN akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa dalam Nagari. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 bahwa perkara yang ditimbulkan dari sako dan pusako adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya secara damai. Bahwa funsi-fungsi yang dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat nagari"[69]

"Di Minangkabai setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sjarangan*, *Tungku Tigo sajaranga* merupakan perwkilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum Intelektual) dan ninik mamak (penghulu suku). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali

[68] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[69] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nagari dengan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairung nagari".[70]

Proses penyelesaian perkara di tingkat Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh ninik mamak yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan adat Nagari untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh mamak kaum.
2. Memberikan tanda perkara yaitu berupa keris pusaka atau kain adat sebagai tanda kebesaran seorang datuk yang memberikan mandat kepaada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya.
3. KAN memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.
4. KAN mendatangkan saksi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa
5. Mengeluarkan tetetapan mengenai hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.
6. Membayar uang pendaftaran dua emas masing-masing pihak, sesuai dengan fatwa adat *limbago dituang adaik diisi*, maksudnya harus ada pemasukan terhadap kas adat setelah selesai perkara yang diselesaikan oledh KAN.[71]

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh msyarakat kenagrian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikan nya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Malelo dan Maharani telah dilaporkan ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitiung namun tidak bisa diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

[70] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[71] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sitiung dikarenakan merupakan sengketa antar anggota kaum dengan pihak luar yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat. [72]

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak awin yang merupakan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo kemudian dilakukan secara mediasi di Kantor Pertanahan Dharmasraya.[73]

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya mengacu berdasarkan Perpres No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional[74], yang menetapkan bahwa salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahansebagaimana yang diatur dalam pasal 23 point c adalah penanganan masalah,sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum.

Kemudian,mengacu juga aturan yang ada dibawahnya yaitu Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionai Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional danKantor Pertanahan pasal 75, yang menyatakan bahwa tugas menyiapkan bahandan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahanberada pada Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.

Kemudian dijelaskan lagipada pasal 77 dan 78 tentang adanya pembagian Seksi Sengketa, Konflik danPerkara berdasarkan tugas-tugasnya menjadi :

1. Sub Seksi Sengketa dan Konflik, yang mempunyai tugas menyiapkanpengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik

[72] Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Sutan Datuk Marajo tanggal 9 Juni 2022.
[73] Hasil wawancara dengan salah satu ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo tanggal 6 juni 2022.
[74] Hasil wawancara dengan Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tanggal 14 Juni 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap sengketadan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentianhubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah,pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi,dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;

2. Sub Seksi Perkara Pertanahan, yang mempunyai tugas menyiapkanpenanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara,usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antaraorang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusanlembaga peradilan.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam hal teknis pelaksanaan mediasi juga berpedoman pada Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian MasalahPertanahan, terutama pada Petunjuk teknis No. 05/juknis/d.v/2007 Tentangmekanisme pelaksanaan mediasi.Kantor Pertanahan melaksanakan mediasi mengacu pada Petunjuk teknisNo. 05/juknis/d.v/2007 Tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yangterdapat dalam Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34 tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.[75]

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, dalam melaksanakan tahap-tahap mediasimenyesuaikan dengan situasi dan kondisi, yang tentu saja tidak meninggalkan hal-hal yang penting sesuai garis besar petunjuk teknis tersebut.

[75] Hasil wawancara dengan Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tanggal 14 Juni 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahap-tahap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, yaitu :[76]

1. Pra-Mediasi.

a. Pengaduan

Pada tahap ini Kantor Pertanahan membuka ruang pengaduan bagimasyarakat di Kabupaten Dharmasraya untuk menyampaikan aduannya terkaitadanya permasalahan tanah yang mereka hadapi. Pengaduan darimasyarakat dapat dilakukan dengan dua cara :

1) Pengaduan Lisan dengan pengaduan lisan ini, masyarakat datang langsung keKantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, yang kemudian akan diterima oleh petugas dalam hal ini pihak Seksi Sengketa, Konflik danperkara.
2) Pengaduan Tertulis Pada prinsipnya, sistem pengaduan tertulis atau surat adalahsama dengan pengaduan lisan. Dalam hal, pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Kantor Pertanahan Masyarakat yang mengadukan permasalahannya dengan caramengirimkan surat aduan permasalahan pertanahan ataupunpermintaan pemblokiran, disertai dengan menlampirkan buktibuktiterkait, seperti : foto copy sertifikat tanah, foto copy bukutanah, foto copy bukti jual beli dan lain sebagainya.

b. Analisis Masalah

Setelah adanya pengaduan dari masyarakat, maka pihak KantorPertanahan Kabupaten Dharmasraya melakukan analisis atau kajian

[76] Hasil wawancara dengan Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tanggal 14 Juni 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentangpermasalahan yang diadukan. Analisis masalah ini dilakukan melaluidua cara, yaitu:

1) Rapat koordinasi dilakukan oleh Seksi Sengketa Konflik danPerkara, untuk membahas pengaduan masyarakat dengan caramempelajari aduan tersebut yang disertai dengan data-data yangberkaitan dengan pengaduan itu. Dalam rapat koordinasi ini akanmencari kesimpulan tindak lanjut, apakah akan diadakan penelitianlebih lanjut yang kemudian perlu dilakukan gelar perkara, ataupunakan diupayakan dengan melakukan musyawarah/mediasi.
2) Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yangdisampaikan oleh penyaji yang dalam hal ini Kepala Seksi Konflik,Sengketa dan Perkara, untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenaimasalah pertanahan, langkah-langkah penanganan danpenyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelarperkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

2. Proses Mediasi

Setelah berbagai proses pra-mediasi telah dilalui, yang pada akhirnyamenuntun untuk dilakukannya suatu mediasi demi terselesainya suatupermasalahan pertanahan, maka mulailah dilakukan upaya mediasi itudengan terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan. Langkah-langkahmediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Dharmasraya adalahsebagai berikut :

a. Persiapan Pembentukan tim Penyiapan bahan Menentukan waktu dan tempat mediasi .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Undangan

c. Kegiatan Awal Mediasi

d. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah

e. Identifikasi kepentingan hasil

f. Generalisasi opsi-opsi para pihak

g. Penentuan opsi yang dipilih

h. Negosiasi Akhir Formalisasi kesepakata npenyelesaian sengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Hendri yang merupakan ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya juga tidak mendapatkan hasil hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaan mediasi sengketa tanah selama proses mediasi salah satu pihak yang bersengketa yaitu Maharani tidak pernah hadir dalam proses mediasi di di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dan tidak adanya iktikad baik dari pihak Maharani dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di nagari Sitiung masih belum selesai.[77]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Nagari Sitiung bahwa saat ini para pihak dari masyarakat adat setempat sedang mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan ke PTUN Kabupaten Dharmasraya atas dikeluarkannya

[77] Hasil wawancara dengan pak Hendri yang merupakan ninik mamak kaum adat Datuk Rajo Malelo tanggal 6 juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sertifikat atas tanah ulayat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.[78]

B. Faktor penghambat Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya

Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non litigasi di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya. Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah satu atau kedua belah pihak, menjadi kendala tersendiri. Ketika ada pihak yang tidak hadir memenuhi undangan, maka dari mediator menawarkan kepada salah satu pihak yang hadir apakah akan diupayakan lagi atau tidak, jika tidak maka akan dihentikan tetapi jika masih meminta untuk diupayakan mediasi, maka mediator dan pihak Kantor Pertanahan akan mengupayakan sekali lagi. Walaupun pada prinsipnya pihak Kantor Pertanahan hanya berusaha mengupayakan mediasi sekali pertemuan. Prosedur untuk mengadakan kembali melakukan proses mediasi sama seperti upaya yang pertama, yaitu dengan menyampaikan kembali undangan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya saat

[78] Hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Nagari Sitiung Malelo tanggal 14 juni 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlangsungnya mediasi setelah semua pihak yang bersengketa memenuhi undangan, dilaksanakan sebagimana rencana semula.

2. Iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa merupakan kunci dari upaya penyelesaian sengeketa tanah melalui mediasi dari proses awal sampai akhir. Akan sangat mudah ketika para pihak sudah menunjukkan skap saling kooperatatif, menunjukkan sikap yang baik untuk sama-sama membicarakan masalah yang ada secara gamblang dan tuntas. Maka akan menjadi pekerjaan yang mudah untuk mengakhiri sengketa tanah yang ada.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya Penyelesaian telah dilakukan secara mediasi, dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di nagari Sitiung masih belum selesai dengan dikarenakan salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi.
2. Faktor penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya pertama dikarenakan Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah satu atau kedua belah pihak, menjadi kendala tersendiri. Dan tidak adanya Iktikad baik dari salah satu pihak yang bersengketa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diaharapkan kepada masyarakat minangkabau terkhusus yang ada di Nagari Sitiung agar tidak minanggalkan Hukum adat minangkabau,karena telah terjadinya kehilangan kepercayaan terhadap hukum adat itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin, 2012, *PengantarPenelitianHukum*, GrafindoPersada, Jakarta

AbidinMas"oed, 2004, *AdatdanSyarak di Minangkabau*, PusatPengkajian Islam danMinangkabau (PPIM) Sumatera Barat, Padang.

Edison MS, 2010, *BudayadanHukumAdat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.

HanifahMardalena, 2012, *Bahan Ajar HukumAdat*, FakultasHukum, Universitas Riau.

MulyadiDwiSeto, 2011,*UUD 1945 danPerubahannya*, PT SukaBuku, Jakarta.

Widjaja HAW., 2003, *PemerintahanDesa/Marga*, Raja GrafindoPersada, JakartaAmriani, Nurnaningsih, 2012. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Harsono, Boedi. 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta:

Universitas Trisakti.

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GaungPersada Press.

Ismail, Ilyas . 2011. *Konsepsi Hak Garap atas Tanah*. Medan: Perdana Publishing.

Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. 2017. *BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca PerKabupatenan No. 11 Tahun 2016*.

Limbong, Bernhard . 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Murad, Rusmadi . 1991. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Orlando, Galih . 2017. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan*.

Riduwan. 2009.*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung:

Alfabeta.

Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: KencanaPrenada Media.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumardjono, Maria dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : Kompas.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : Kompas.

Syarif, Elza. 2004. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal/Makalah/Kamus

Beckmaan-Benda von Franz , Keebet von Benda-Beckmann, 1994, Property, Politics, and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared, *Law and Society Rivew*, 28 Law & Soc‟y Rev. 589.

Erwin, 2011, "Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Mayarakat", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Vol. 24, No. 2, hlm. 4.

MukminZake, 2011, "Pengadaan Tanah UntukKepentinganUmum (Perbandinganantara Malaysia dan Indonesia)", Vol. 18, No.EdisiKhusus, (Oktober) .

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perpres No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Pasal 1 angka 5 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionai Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional danKantor Pertanahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian MasalahPertanahan

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :